

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Sesuai dengan Pasal 7 Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah dengan mendorong partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses pembangunan.

Disahkannya Permendagri 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP No. 8 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Merupakan sebuah terobosan baru dalam implementasi perencanaan pembangunan daerah yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam pembangunan, masyarakat diberikan kesempatan lebih dalam mengusulkan aspirasinya. Serta proses pelaksanaan musrenbang yang tertata dan terstruktur, sehingga proses penyaringan aspirasi serta hasil skala prioritas usulan yang dibawa dalam musrenbang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bontang adalah :

1. Landasan Idiil : Pancasila
2. Landasan Konstitusional : UUD 1945
3. Landasan Filosofis : Bhineka Tunggal Ika
4. Landasan Visional : Negara Kesatuan Republik Indonesia
5. Landasan Operasional : menyangkut peraturan perundangan yaitu:
 1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286.



2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
4. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437).
5. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
6. Undang-undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.
7. Undang-undang Nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan.
8. Undang-undang Nomor 12 tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka.
9. Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.
10. Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
11. Peraturan Pemerintah No. 56 tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4124.
12. Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.
13. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga.
14. Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 2007 tentang Pendanaan Olahraga.
15. Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
16. Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
17. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
18. Peraturan Presiden No. 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014.

19. Peraturan Presiden No. 22 tahun 2010 tentang Program Indonesia Emas
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam negeri No. 59 tahun 2007 dan perubahan kedua sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Tata Cara Musrenbang (Lampiran VI, Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah)
22. Peraturan Daerah Kota Bontang No. 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.
23. Peraturan Daerah Kota Bontang No. 8 Tahun 2011 tentang RPJMD Kota Bontang Tahun 2011 - 2016
24. Peraturan Walikota Bontang No. 35 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bontang.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja SKPD Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bontang Tahun 2016 ini dimaksudkan untuk menjadikan acuan ke masa depan, baik untuk Pemerintah Kota Bontang pada umumnya maupun Dinas Pemuda dan Olahraga pada Khususnya yang nantinya akan menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), sebagai bahan tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang merupakan pedoman pelaksanaan kegiatan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dengan disusunnya Renja SKPD Dinas Pemuda dan Olahraga adalah :

“ Meningkatkan peranan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bontang dalam rangka menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis lingkup bidang bina kepemudaan, bina keolahragaan dan gerakan pramuka guna mewujudkan Visi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bontang, yaitu “ Terwujudnya Pemuda Kota Bontang Yang Inovatif, Mandiri, Sehat dan Berprestasi .” Yang mencerminkan sifat – sifat berbudi luhur, yaitu : jujur, sabar, antusias, cinta dan peduli.

1.4 Sistematika Penulisan

Renja SKPD Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bontang ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:



- Bab I Pendahuluan**, Bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD agar substansi pada bab – bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.
- Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD** , Bab ini memuat informasi evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan capaian Renstra SKPD, Analisis kinerja pelayanan SKPD, Isu – isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, Review terhadap rancangan awal RKPD dan Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.
- Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan**, Bab ini terdiri dari beberapa bagian pembahasan, yaitu : Telaahan terhadap kebijakan nasional dan prioritas pembangunan, Tujuan dan sasaran Renja SKPD, serta Perencanaan program dan kegiatan SKPD.
- Bab VI Penutup**, Bab ini berisi harapan dan komitmen merealisasikan Renja, kaidah – kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU****2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD**

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu harus dilakukan evaluasi terhadap Renja Tahun 2014 dan Renja Tahun 2015 (tahun berjalan), evaluasi yang dilakukan meliputi 3 (tiga) hal yaitu kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan rencana program & kegiatan, dan hasil rencana program & kegiatan.

Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana program dan kegiatan dapat terlihat dari :

Evaluasi program/kegiatan Tahun 2014

Dalam rangka melaksanakan kegiatan pembinaan dan pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bontang mendapatkan dana anggaran untuk belanja langsung dan tidak langsung sebesar Rp. 31.655.867.185,- terealisasi sebesar Rp. 23.040.216.687,- atau 72,78 %, sedangkan sisa dana yang dikembalikan sebesar Rp 8.615.650.498,- atau 27,22 %, dengan rincian sebagai berikut :

Belanja tidak langsung Dana	:	Rp.	2.612.513.685,-	(8 %)
Realisasi	:	Rp.	2.169.828.608,-	(7 %)
Sisa	:	Rp.	442.685.077,-	(1 %)
Belanja langsung Dana	:	Rp.	29.043.353.500,-	(92 %)
Realisasi	:	Rp.	20.870.388.079,-	(66 %)
Sisa	:	Rp.	8.172.965.421,-	(26 %)

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, antara lain :

- A. Bidang Pemuda, semua kegiatan yang terealisasi dibidang pemuda telah mencapai hasil yang direncanakan.
- B. Bidang Olahraga
 1. Kegiatan Pemberian Penghargaan Bagi Insan Olahraga yang Berprestasi dan Berdedikasi.
 2. Kegiatan Pelaksanaan Pekan Olahraga Kota Bontang

2. Realisasi Program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

A. Bidang Pemuda

1. Kegiatan pendataan potensi kepemudaan
2. Kegiatan Sosialisasi UU Kepemudaan
3. Kegiatan Fasilitasi kegiatan pramuka
4. Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan
5. Kegiatan Fasilitasi aksi bakti sosial kepemudaan
6. Kegiatan Peringatan hari sumpah pemuda
7. Kegiatan Pelatihan dan pembinaan calon anggota paskibraka
8. Kegiatan Pertukaran pemuda antar propinsi
9. Kegiatan Seleksi paskibraka kota Bontang
10. Kegiatan Studi orientasi bagi paskibra, pendamping dan pelatih paskibra
11. Kegiatan Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda
12. Kegiatan Pelatihan keterampilan bagi pemuda
13. Kegiatan Seleksi dan pengiriman pemuda pelopor
14. Kegiatan Pembinaan kelompok pemuda produktif
15. Kegiatan Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda

B. Bidang olahraga

1. Kegiatan pelaksanaan identifikasi dan pengembangan olahraga unggulan daerah.
2. Kegiatan pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat
3. Kegiatan pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah
4. Kegiatan peringatan hari olahraga nasional
5. Kegiatan Liga Pendidikan Indonesia
6. Kegiatan Pekan Olahraga Pelajar Provinsi (POP PROV) Kalimantan Timur
7. Kegiatan Kompetisi Olahraga Kemasyarakatan
8. Kegiatan pembinaan dan peningkatan prestasi atlet penyandang cacat Kota Bontang
9. Kegiatan Pelaksanaan Turnamen Golf Walikota Cup
10. Kegiatan Pemusatan Pelatihan Bagi Atlet POP PROV Kota Bontang
11. Kegiatan Pekan Olahraga Pelajar Provinsi (POP PROV) Kalimantan Timur (Bantuan Keuangan Provinsi)
12. Kegiatan Fasilitasi dan Pendampingan Kontingen POP PROV Kota Bontang
13. Pelaksanaan Turnamen Sepakbola Kapolres Cup

Pencapaian kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bontang pada tahun 2014 dari 13 Program dan 56 Kegiatan. Telah terlaksanan 13 Program dan 53 Kegiatan

dengan persentase capaian fisik berdasarkan SMEP 97,11 % dan Keuangan 71,86 % (dari total Belanja Langsung). Adapun 3 Kegiatan yang tidak terealisasi, dengan rincian 2 Kegiatan yang tidak dilaksanakan hingga akhir tahun anggaran, dan 1 Kegiatan yang tidak tercapai sasaran keluaran kegiatan. Evaluasi kegiatan dijelaskan pada tabel dibawah ini:

NO	IDENTIFIKASI MASALAH		RENCANA TINDAK LANJUT
	KEGIATAN	DESKRIPSI MASALAH	
1	2	3	4
1	Verifikasi, Monitoring, dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Daerah	Kegiatan ini tidak jadi dilaksanakan dikarenakan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bontang di Tahun 2014, tidak melaksanakan proses verifikasi secara administratif, substantife dan lapangan terhadap proposal calon penerima hibah bansos Kepemudaan dan Keolahragaan yang diusulkan untuk diberikan pada APBD Kota Bontang Tahun 2015 .	Belanja Pegawai dan Barang Jasa Kegiatan ini tidak realisasikan.
2	Pemberian Penghargaan Bagi Insan Olahraga Yang Berprestasi dan Berdedikasi	Kegiatan ini tidak dilaksanakan karena belum ada data dari cabor-cabor yang bisa dipertanggungjawabkan mengenai insan olahraga yang berprestasi pada event-event olahraga di tahun 2014. Serta belum adanya aturan perundang-undangan berupa Perda ataupun Perwali, mengenai standar nilai pemberian penghargaan baik berupa uang ataupun barang bagi insan olahraga yang berprestasi dan berdedikasi.	Akan dilaksanakan sinkronisasi data antara Dispora dengan cabor-cabor mengenai data insan olahraga Kota Bontang yang berprestasi dan berdedikasi. Serta Dispora akan membuat dan mengusulkan draft berupa Perda/Perwali mengenai standar nilai pemberian penghargaan baik berupa uang ataupun barang bagi insan olahraga yang berprestasi dan berdedikasi.
3	Pelaksanaan Pekan Olahraga Kota Bontang	Rencananya kegiatan ini akan dilaksanakan dalam rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun Kota Bontang, Dinas Pemuda dan Olahraga sebagai pelaksana telah merealisasikan belanja barang dan jasa untuk menunjang pelaksanaan kegiatan. Kegiatan ini melibatkan lima belas Kelurahan Se-Kota Bontang sebagai peserta. Dikarenakan Kelurahan belum memiliki anggaran untuk keikutsertaan Pekan Olahraga Kota Bontang, maka anggaran bagi Kelurahan rencananya akan dianggarkan didalam APBDP Kota Bontang Tahun 2014. Akan tetapi dikarenakan APBDP Kota Bontang mengalami defisit, maka bantuan penambahan anggaran kepada Kelurahan tidak jadi diberikan. Sehingga Pelaksanaan Pekan Olahraga Kota Bontang tidak jadi diselenggarakan.	Dikarenakan Kegiatan tidak jadi diselenggarakan sedangkan belanja barang dan jasa berupa pakaian panitia dan medali/trophy sudah direalisasikan. Maka barang hasil belanja barang dan jasa tersebut disimpan digudang dan tercatat sebagai persediaan.

Perkiraan pencapaian Tahun Anggaran 2015

Sedangkan untuk Tahun berjalan yaitu Tahun 2015 dengan anggaran sebesar Rp. 23.709.601.159; (BTL : Rp. 3.011.857.159 dan BL : Rp. 20.697.744.000) yang terdiri dari 10 program dan 50 kegiatan. Terjadi penurunan nilai anggaran yang dikelola oleh Dinas Pemuda dan Olahraga jika dibandingkan dengan tahun 2014, sehingga jumlah program/kegiatan yang dilaksanakan berkurang karena menyesuaikan jumlah anggaran dan berdasarkan skala prioritas. Walaupun mengalami penurunan jumlah anggaran, diharapkan keberhasilan kinerja tahun 2015 bisa mencapai 100% , baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik.

Kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan di Tahun 2015 dan tidak terealisasi, adalah :

A. Bidang Pemuda

1. Rapat Koordinasi OKP Se-Kota Bontang
2. Pelatihan Keterampilan Bagi Pemuda
3. Pemberian Penyuluhan Tentang Bahaya Narkoba Bagi Pemuda

B. Bidang Olahraga

1. Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat
2. Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi di Tingkat Daerah
3. Pengembangan olahraga rekreasi
4. Kompetisi Olahraga Penyandang Cacat
5. Even Turnamen Nasional dan Internasional olahraga pelajar dan mahasiswa
6. Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi Di Tingkat Daerah

Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2015 terdiri dari :

A. Bidang Pemuda

1. Peringatan Hari Gerakan Pramuka
2. Fasilitasi Kegiatan Pramuka
3. Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan Kepemudaan
4. Fasilitasi Kegiatan Majelis Pembimbing Cabang Kwartir Cabang Kota Bontang
5. Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan
6. Fasilitasi Aksi Bakti Sosial Kepemudaan
7. Peringatan hari sumpah pemuda
8. Pelatihan dan pembinaan calon anggota paskibraka
9. Pertukaran pemuda antar provinsi
10. Tuan Rumah Bhakti Pemuda Antar Provinsi
11. Studi Orientasi Bagi Paskibra, Pendamping dan Pelatih Paskibra
12. Seleksi paskibraka Kota Bontang

13. Fasilitasi Kegiatan KNPI
 14. Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda
 15. Seleksi dan pengiriman pemuda pelopor
 16. Pembinaan kelompok pemuda produktif
- B. Bidang Olahraga
1. Pelaksanaan identifikasi dan pengembangan olahraga unggulan daerah
 2. Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi
 3. Pembinaan Pelatih Olahraga
 4. Peringatan hari olahraga nasional
 5. Liga pendidikan Indonesia
 6. Pengiriman Atlet Singa Cup
 7. Pelaksanaan Turnamen Sepakbola Walikota Cup
 8. Pelaksanaan Turnamen Sepakbola Usia Dini Walikota Cup U-12 dan U-14
 9. Pelaksanaan PERBAKIN Walikota Cup
 10. Pemusatan Latihan (TC) PORSD dan MI
 11. Pekan Olahraga Pelajar Tingkat Kota Bontang (Seleksi POPPROV)
 12. Fasilitasi Kegiatan Suratin Cup
 13. Fasilitasi Kegiatan Liga Nusantara
 14. Fasilitasi Kegiatan Korwil IMI

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya/terpenuhinya target kinerja program/kegiatan, disebabkan oleh :

1. Adanya keterbatasan anggaran sehingga mengakibatkan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bontang tidak leluasa dalam melaksanakan semua program kerja yang telah direncanakan
2. Belum optimalnya pelaksanaan tupoksi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bontang, karena kuantitas dan terbatasnya kualitas sumber daya aparatur yang masih minim, sehingga mengakibatkan kurangnya pelaksanaan program dan kegiatan
3. Kurang sinkronnya program kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur dan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bontang
4. Belum optimalnya koordinasi dalam perencanaan program dan kegiatan antara Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bontang dengan mitranya Kwarcab Pramuka, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) dan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), sehingga menyebabkan rendahnya keterpaduan dalam fungsi perencanaan, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan.

5. Terbitnya peraturan Perundang-Undangan mengenai tata cara pemberian dan pertanggungjawaban dana hibah/bansos yang berasal dari APBD. Sehingga rawan menimbulkan konflik antara Dinas Pemuda dan Olahraga dengan mitra kerjanya, hal ini dikarenakan mitra kerja telah terbiasa mengelola dana hibah sendiri, sehingga dengan adanya aturan tersebut pemberian dana hibah/bansos dibatasi dan kewenangan pelaksanaan urusan pemerintah Kepemudaan dan Keolahragaan dikembalikan secara penuh kepada SKPD teknis yang dibentuk Pemerintah Daerah. Sedangkan mitra kerja mempunyai hak yang terbatas hanya membantu Dinas Pemuda dan Olahraga dalam melaksanakan kegiatan.

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bontang Tahun 2011-2016, maka tindakan perencanaan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

1. Membuat telaahan staf kepada Walikota Bontang, tentang keragaman tupoksi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bontang. Selain yang tercakup dalam lampiran A.VII Permendagri 13 tahun 2006, program dan kegiatan Kementerian Pemuda dan Olahraga maupun Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur. Sehingga memerlukan pendanaan yang cukup besar untuk melaksanakan tugas fungsi tersebut
2. Meningkatkan komunikasi, koordinasi dan konsultasi dari tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Timur dalam pelaksanaan program kegiatan
3. Melakukan pendekatan kepada mitra Dispora yaitu Kwarda Pramuka, KONI dan KNPI dengan cara mengikutsertakan dalam perencanaan dan penyusunan program kegiatan sehingga dapat tercapai tujuan bersama
4. Gencar melakukan Sosialisasi dan mengajak mitra kerja beradaptasi dengan aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pelaksanaan urusan wajib pemerintah dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah.
5. Membuat analisis beban kerja yang realistis sehingga bisa dijadikan dasar permohonan penambahan sumber daya aparatur
6. Memberikan pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis kepada sumber daya aparatur sehingga dapat meningkatkan kinerja pelayanan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bontang sampai dengan tahun 2015 dapat dilihat dari tabel rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja SKPD dan pencapaian Renstra SKPD.

***) Tabel T-VI.C.5 Terlampir**

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bontang, memiliki tupoksi yang sangat komplit dan luas, dengan didukung aparatur sejumlah 55 (lima puluh lima) orang pegawai yang terdiri dari 23 (dua puluh tiga) orang PNS, 1 (satu) orang CPNS dan 31 (Tiga Puluh Satu) orang tenaga Non PNS, dengan tupoksi 14 (Empat Belas) orang sebagai staf administrasi, 12 (Dua Belas) orang bertugas Tenaga Keamanan sarana dan prasana olahraga sedangkan 5 (Lima) orang bertugas Tenaga Kebersihan sarana dan prasarana olahraga. Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bontang dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa bangunan kantor di Kantor bersama Graha Taman Praja Blok II Lantai II, Sarana Prasana Olahraga (Stadion Taman Prestasi ,GOR Taman Lestari, Stadion Bessai Berinta, Lapangan Tenis Bessai Berinta dan Lapangan Sepakbola Tanjung Laut), kendaraan dinas, dan fasilitas lainnya. Dengan terbitnya UU No.12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka, maka revitalisasi Gerakan Pramuka menjadi tanggung jawab Dinas Pemuda dan Olahraga. Sehingga harus memiliki perencanaan yang matang dalam anggaran agar segala kegiatan dan tupoksi dalam berjalan dengan maksimal tetapi tetap berpegang teguh pada prinsip efektifitas dan efisiensi. Standar tolak ukur pencapaian kinerja didasarkan pada lampiran I Permendagri 54 Tahun 2010 dan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga 2011-2016, standar tolak ukur tersebut juga telah disahkan dan tercantum dalam target RPJMD Pemerintah Kota Bontang 2011 – 2016 .

Tabel tentang Pencapaian kinerja Pelayanan SKPD, yang berisikan indikator target, realisasi dan proyeksi RENSTRA SKPD.

***) Tabel T-VI.C.1 Terlampir**

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

A. Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bontang

Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bontang, memiliki tanggung jawab pelayanan masyarakat yang beragam. Selain bertanggung jawab atas Bina Kepemudaan dan Bina Olahraga, revitalisasi Gerakan Pramuka. Dalam Bina Kepemudaan, Dinas Pemuda dan Olahraga memiliki skala prioritas untuk membangun karakter pemuda yang inovatif dan mandiri tanpa narkoba.

Program dan kegiatan yang direncanakan bekerjasama dengan KwarcabPramuka, KNPI, OKP, Karang taruna dan instansi terkait mengenai

pengembangan dan pemberdayaan pemuda dan pramuka. Dalam Bina Olahraga, Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bontang memiliki skala prioritas untuk regenerasi prestasi dan memasyarakatkan olahraga, agar masyarakat mencintai olahraga dan bekerjasama aktif dengan KONI, Pengkot, BAPOPSI dan instansi terkait guna meningkatnya prestasi olahraga.

Secara umum Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bontang sebagai sebuah Dinas Baru yang terbentuk berdasarkan Perda No. 6 Tahun 2008 dapat dikatakan belum menunjukkan kinerjanya. Tetapi nantinya setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bontang akan mendapat banyak tanggapan positif dari berbagai kalangan. Baik kegiatan yang bersifat hubungan antar dinas/instansi Pemerintah Kota Bontang maupun kegiatan yang melibatkan masyarakat, pemuda dan olahraga.

Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bontang juga akan menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ada. Peranan aktif Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bontang dalam menjalankan tugas pokok sehari-hari diharapkan dapat dirasakan oleh berbagai kalangan dan selalu melibatkan masyarakat, pemuda dan olahraga. Untuk kegiatan sosialisasi dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat dalam dunia kepemudaan dan keolahragaan merupakan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Selain dari itu, fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bontang nantinya harus mampu menunjukkan peranan penting dalam setiap aktivitas kepemudaan dan olahraga. Keberadaan Dinas ini diharapkan menjadi pioner kemajuan dunia kepemudaan dan keolahragaan yang ada di Kota Bontang. Didalam kegiatan intern Pemerintah Kota Bontang pun, nantinya Dinas Pemuda dan Olahraga mampu memberikan peranan yang signifikan bagi kemajuan pergerakan pemuda dan prestasi olahraga secara umum, serta suksesor revitalisasi Gerakan Pramuka.

B. Visi dan Misi Kepala daerah dan faktor-faktor permasalahan yang dihadapi dalam mewujudkan Visi dan Misi Kepala daerah, serta Visi dan Misi Organisasi.

a. Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

“Mewujudkan Masyarakat Bontang yang Berbudi, Maju, Adil dan Sejahtera.”

b. Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

- a. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Kota Bontang yang berakhlak mulia dan profesional.
- b. Meningkatkan kualitas tata pemerintahan yang baik.

- c. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup
- d. Memperkuat struktur ekonomi Kota Bontang dengan cara mempercepat pemenuhan kebutuhan listrik, air bersih serta infrastruktur lainnya.

Berdasarkan penjabaran misi diatas. Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bontang masuk dalam misi pertama, yaitu ***“ Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Kota Bontang Yang Berakhlak Mulia dan Profesional.”*** Serta Tujuan 6 dan 7 RPJMD Kota Bontang 2011-2016 (***Tujuan 6 : Meningkatkan Peran Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia Kota Bontang. Dan tujuan 7 : Meningkatkan Peran Organisasi Keolahragaan Dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia Kota Bontang).***

c. Visi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bontang

“Terwujudnya Pemuda Kota Bontang Yang Inovatif, Mandiri, Sehat dan Berprestasi.”

d. Misi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bontang

1. Melaksanakan tugas umum pemerintahan meliputi pembinaan, pelayanan, pemberdayaan, pengawasan, serta pengendalian penyelenggaraan kegiatan kepemudaan dan keolahragaan.
2. Menyusun dan menetapkan rencana kegiatan yang berhubungan dengan bidang kepemudaan dan bidang keolahragaan demi terwujudnya masyarakat Kota Bontang yang berbudi, maju, adil dan sejahtera.
3. Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan kerja sama dengan organisasi kepemudaan dan organisasi keolahragaan.
4. Mewujudkan profesionalisme dan sportifitas pelaku olahraga dalam mencapai prestasi, serta meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan.
5. Melakukan pembinaan olahraga usia dini demi menciptakan atlet berprestasi, dan menanamkan pada diri pemuda rasa cinta tanah air dan jiwa Pancasila.
6. Mewujudkan kehidupan sosial pemuda dan pelaku olahraga yang berkepribadian, dinamis, kreatif dan mampu bertahan terhadap pengaruh negatif globalisasi.

e. Faktor Permasalahan, Isu-isu Strategis, Strategi dan Kebijakan.

Dalam mencapai visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah , tujuan RPJMD serta visi dan misi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bontang banyak permasalahan baik dari faktor intern maupun ekstern. Antara lain :

*** Faktor Intern**

- a. Disharmonisasi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bontang dengan KNPI sebagai mitra dalam pembinaan pemuda serta KONI sebagai mitra dalam pembinaan Olahraga.
- b. Terbatasnya anggaran yang dimiliki.
- c. Masih kurangnya wawasan personil, dan keterbatasan jumlah SDM baik secara kuantitas maupun kualitas yang dimiliki oleh Dinas Pemuda dan Olahraga.
- d. Minimnya berbagai sarana dan prasarana teknis yang dapat menunjang kinerja dinas dan kinerja pegawai secara umum dan khusus.

*** Faktor Ekstern**

- a. Kurangnya rasa nasionalisme dan wawasan kebangsaan dikalangan generasi muda.
- b. Tinggi jumlah pengangguran dikalangan pemuda.
- c. Meningkatnya jumlah pemuda dalam penyalahgunaan Narkoba.
- d. Kurangnya minat dari generasi muda menjadi atlet dikarenakan kurangnya jaminan akan kesejahteraan.
- e. Masyarakat kurang mencintai olahraga.

Walaupun ada hambatan baik dari faktor ekstern maupun intern, Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bontang memiliki beberapa faktor pendukung dalam pencapaian dalam meminimalkan permasalahan yang ada. Yaitu sumber daya manusia yang relatif berusia muda dan memiliki loyalitas serta komitmen tinggi, untuk menjalankan tupoksi.

Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bontang dalam mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, harus menghadapi isu - isu strategis yang diharapkan mampu terselesaikan dengan adanya Renstra ini dalam kurun waktu 5 tahun kedepan.

Adapun isu – isu strategis tersebut, adalah :

- a. Disharmonisasi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bontang dengan KNPI sebagai mitra dalam pembinaan pemuda serta KONI sebagai mitra dalam pembinaan Olahraga.
- b. Kurangnya rasa nasionalisme dan wawasan kebangsaan dikalangan generasi muda.
- c. Tinggi jumlah pengangguran dikalangan pemuda.
- d. Meningkatnya jumlah pemuda dalam penyalahgunaan Narkoba.
- e. Kurangnya minat dari generasi muda menjadi atlet dikarenakan kurangnya jaminan akan kesejahteraan.

- f. Minimnya berbagai sarana dan prasarana teknis yang dapat menunjang kinerja dinas dan kinerja pegawai secara umum dan khusus.
- g. Mutasi atlit asli binaan ke daerah lain, karena faktor keinginan untuk prestasi instant dengan mengabaikan semangat regenerasi prestasi.
- h. Memasyrakatkan olahraga dengan mengembangkan olahraga kemasyarakatan.
- i. Sektor penganggaran yang kurang jelas dan masih tumpang tindih dalam pembinaan pemuda dan olahraga.

Adapun penanganan strategi pembangunan bidang bina pemuda dan bina olahraga yang menjadi prioritas Dinas Pemuda dan Olahraga menurut Tugas pokok dan fungsinya berlandaskan kepada :

- Visi dan Misi Pembangunan 5 tahun Kota Bontang
- Visi dan Misi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bontang
- Analisis SWOT
- Kebijakan Umum Anggaran

Dalam rangka mengatur penggunaan belanja daerah guna meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat perlu disusun skala prioritas melalui penetapan kebijakan umum belanja daerah. Skala prioritas tersebut dirumuskan dengan berpedoman pada dokumen RPJMD, evaluasi pelaksanaan anggaran tahun-tahun sebelumnya, aspirasi atau tuntutan masyarakat, yang diperoleh melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang).

Sejalan dengan hal tersebut, maka disusunlah rumusan kebijakan umum pembangunan daerah Kota Bontang 2011-2016 yang mencakup tujuan, sasaran dan kebijakan, yang dalam konteks perencanaan jangka pendek. Dituangkan dalam Renja 2015 sebagai pedoman pelaksanaan tupoksinya. Dalam hal ini Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bontang akan mengambil tujuan, sasaran dan kebijakan yang menjadi tugas pokok dan fungsinya yakni **“Meningkatkan Pembinaan Kualitas Generasi Muda dan Prestasi Olahraga”**

Untuk mencapai sasaran Meningkatnya Kualitas Generasi Muda dan Prestasi Olahraga ini, maka **kebijakan** pembangunan yang ditetapkan adalah :

1. Meningkatkan peran aktif segenap lapisan masyarakat, pemuda dan olahraga dalam rangka mensukseskan pembangunan sesuai bidangnya.
2. Meningkatkan kualitas generasi muda dan prestasi olahraga
3. Meningkatkan Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda
4. Meningkatkan Pembinaan dan Pelatihan Bagi Olahraga Prestasi

5. Meningkatkan Penumbuhan semangat Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda
6. Meningkatkan Prestasi Pelaku Olahraga
7. Menciptakan generasi muda yang memiliki jiwa kepemimpinan yang berlandaskan Pancasila
8. Melakukan pembibitan serta regenerasi atlit – atlit potensial yang berprestasi dan berdedikasi tinggi.

Dalam merumuskan strategi guna mencapai visi dan misi kepala daerah dan SKPD, maka digunakan analisis SWOT dalam rangka menganalisis Kekuatan-Kelemahan-Peluang-Ancaman yang dimiliki Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bontang baik dari lingkungan eksternal maupun internal.

Tabel analisis SWOT merupakan perencanaan strategis yang dibuat dengan mereview dan menelaah faktor - faktor Kekuatan (Strengths),kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dan ancaman (threats)

***) Tabel analisis SWOT**

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Telahaan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra, Renja dan Pencapaian Kinerja (LAKIP) yang dicapai Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bontang. RKPD harus sesuai dan selaras dengan RPJMD serta skala prioritas program/kegiatan yang dicanangkan oleh Kepala Daerah, dalam menunjang pencapaian visi dan misinya. Telahaan tersebut dapat diukur dan menjadi indikator penting dalam penyusunan LPPD dan LKPJ Kepala Daerah.

Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk SKPD yang bersangkutan. Hasil review tersebut tertuang dalam Renja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bontang Tahun 2016.

Tabel review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2016, yang memuat rancangan awal RKPD baik dari segi program maupun pagu indikatif keuangan yang ditelaah dengan analisis kebutuhan program dan anggaran yang dibutuhkan SKPD.

***)Tabel T-VI.C.7 Terlampir**

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.

Program dan kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bontang, bukan hanya sebagai perwujudan nyata tanggung jawab dan peran serta pemerintah dalam urusan wajibnya (Lampiran A VII Permendagri 13 tahun 2006) mengenai Kepemudaan dan Olahragaan. Dengan disahkannya UU No. 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. Maka tugas pokok dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga bertambah, selain perumusan kebijakan teknis lingkup bidang bina kepemudaan dan bina keolahragaan, juga bertanggung jawab mengenai pengembangan dan revitalisasi pramuka.

Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bontang juga mengakomodir usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari LSM, asosiasi-asosiasi, maupun berdasarkan hasil musrenbang tingkat kota, selama usulan tersebut sesuai dengan tupoksi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bontang. Serta yang menjadi acuan juga dalam usulan program/kegiatan Tahun 2016 adalah hasil rapat sinkronisasi program/kegiatan kepemudaan dan keolahragaan Dinas Pemuda dan Olahraga se-Kalimantan Timur di Kabupaten Penajam Paser Utara, tanggal 12-14 Maret 2015.

Tabel usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan (masyarakat, mitra Pemerintah Kota dalam membina kepemudaan dan keolahragaan, kebijakan Pemerintah Pusat serta hasil rapat sinkronisasi program/kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga se-Kalimantan Timur)

***)Tabel T-VI.C.9 Terlampir**

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pada tahap yang ketiga yaitu RPJMN 2015 – 2019, pembangunan ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus meningkat.

Sejalan dengan kondisi aman dan damai yang makin mantap di seluruh wilayah Indonesia, kemampuan pertahanan nasional dan keamanan dalam negeri makin menguat yang ditandai dengan terbangunnya profesionalisme institusi pertahanan dan keamanan negara serta meningkatnya kecukupan kesejahteraan prajurit serta ketersediaan alat utama sistem persenjataan TNI dan alat utama Polri melalui pemberdayaan industri pertahanan nasional. Kehidupan demokrasi bangsa makin mengakar dalam kehidupan bangsa sejalan dengan makin mantapnya pelebagaan nilai-nilai demokrasi dengan menitikberatkan pada prinsip toleransi, nondiskriminasi dan kemitraan dan semakin mantapnya pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Kondisi itu mendorong tercapainya penguatan kepemimpinan dan kontribusi Indonesia dalam berbagai kerja sama internasional dalam rangka mewujudkan tatanan dunia yang lebih adil dan damai dalam berbagai aspek kehidupan. Bersamaan dengan itu kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek kehidupan berkembang makin mantap serta profesionalisme aparatur negara di pusat dan daerah makin mampu mendukung pembangunan nasional.

Kesejahteraan rakyat terus membaik, meningkat sebanding dengan tingkat kesejahteraan negara-negara berpendapatan menengah, dan merata yang didorong oleh meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yang disertai terwujudnya lembaga jaminan sosial. Kualitas sumber daya manusia terus membaik ditandai oleh meningkatnya kualitas dan relevansi pendidikan, termasuk yang berbasis keunggulan lokal dan didukung oleh manajemen pelayananan pendidikan yang efisien dan efektif; meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat; meningkatnya kesetaraan gender; meningkatnya tumbuh kembang optimal, serta kesejahteraan dan perlindungan anak; tercapainya kondisi penduduk tumbuh seimbang; dan mantapnya budaya dan karakter bangsa.

Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang semakin mantap dicerminkan oleh terjaganya daya dukung lingkungan dan kemampuan pemulihan untuk mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang,

dan lestari; terus membaiknya pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam yang diimbangi dengan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup dan didukung oleh meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat; serta semakin mantapnya kelembagaan dan kapasitas penataan ruang di seluruh wilayah Indonesia.

Daya saing perekonomian Indonesia semakin kuat dan kompetitif dengan semakin terpadunya industri manufaktur dengan pertanian, kelautan dan sumber daya alam lainnya secara berkelanjutan; terpenuhinya ketersediaan infrastruktur yang didukung oleh mantapnya kerja sama pemerintah dan dunia usaha, makin selarasnya pembangunan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi dan industri serta terlaksananya penataan kelembagaan ekonomi untuk mendorong peningkatan efisiensi, produktivitas, penguasaan dan penerapan teknologi oleh masyarakat dalam kegiatan perekonomian.

Ketersediaan infrastruktur yang sesuai dengan rencana tata ruang ditandai oleh berkembangnya jaringan infrastruktur transportasi; terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang handal dan efisien sesuai kebutuhan sehingga elektrifikasi rumah tangga dan elektrifikasi perdesaan dapat tercapai, serta mulai dimanfaatkannya tenaga nuklir untuk pembangkit listrik dengan mempertimbangkan faktor keselamatan secara ketat; terselenggaranya pelayanan pos dan telematika yang efisien dan modern guna terciptanya masyarakat informasi Indonesia; terwujudnya konservasi sumber daya air yang mampu menjaga keberlanjutan fungsi sumber daya air dan pengembangan sumber daya air serta terpenuhinya penyediaan air minum untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Selain itu, pengembangan infrastruktur perdesaan akan terus dikembangkan, terutama untuk mendukung pembangunan pertanian. Sejalan dengan itu, pemenuhan kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh masyarakat terus meningkat karena didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang dan berkelanjutan, efisien, dan akuntabel. Kondisi itu semakin mendorong terwujudnya kota tanpa permukiman kumuh.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 diamanatkan bahwa Program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah dirumuskan kedalam RKPD untuk didanai APBD masing-masing provinsi pada tahun yang direncanakan sebagai penjabaran dari RPJMD pada tahun yang direncanakan. Mengingat bahwa RPJMD Kalimantan Timur berakhir tahun 2013, maka sesuai dengan Permendagri No 54 Tahun 2010 yang mengamanatkan bahwa pada masa transisi Penyusunan RKPD dan RAPBD mengacu pada RPJMD sebelumnya dengan

tujuan menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode RPJMD dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun pertama masa pemerintahan baru.

RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 merupakan pelaksanaan dari arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Provinsi Kalimantan Timur 2005-2025 tahap ketiga. RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 merupakan kelanjutan dari RPJMD 2009-2013 yang telah dilaksanakan, dievaluasi, dan dilaporkan oleh Gubernur. Secara substantif, isi RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 merupakan perencanaan lanjutan dalam rangka mencapai kondisi Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2025 sebagaimana yang tertuang dalam RPJPD Provinsi Kalimantan Timur. Berbagai evaluasi RJPMD periode sebelumnya dipergunakan untuk menyempurnakan dokumen perencanaan RJPMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018.

Selanjutnya Rancangan Awal RKPD 2016 akan dijabarkan sebagai acuan bagi SKPD Provinsi Kalimantan Timur untuk menyusun Rancangan Awal Renja SKPD 2016 dan berfungsi sebagai guideline/panduan bagi kabupaten/kota untuk menyusun Rancangan RKPD kabupaten/kota. Rancangan Awal RKPD 2016. Setelah melalui tahapan ini selanjutnya dipaduserasikan dengan Rancangan Renja SKPD dalam Forum SKPD Provinsi Kalimantan Timur

Rancangan Awal RKPD ini selanjutnya akan dibahas dalam rapat-rapat koordinasi prioritas pembangunan bidang kesejahteraan rakyat, daya saing ekonomi, infrastruktur, serta reformasi birokrasi pemerintahan dan aparatur, forum SKPD. Dengan memperhatikan Renja SKPD Provinsi dan hasil Musrenbang Kabupaten/Kota, kemudian Rancangan Awal ini dirumuskan menjadi Rancangan RKPD yang dibahas dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Tahun 2016. Acara ini melibatkan seluruh pelaku pembangunan baik pemerintah, swasta dan masyarakat yang berasal dari Provinsi dan Kabupaten/Kota. Selanjutnya berdasarkan aspirasi yang berkembang dirumuskan dalam kesepakatan yang menjadi bahan penyusunan Rancangan Akhir RKPD Tahun 2016.

Rancangan Akhir RKPD disusun berdasarkan hasil kesepakatan Musrenbang secara berjenjang di tingkat Provinsi dan tingkat Kota, serta mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2016 yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Walikota Bontang. RKPD Kota Bontang Tahun 2016 akan menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara (PPAS), serta menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Bontang Tahun 2016.

Program pembangunan daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bontang 2011-2016 adalah merupakan penjabaran dan implementasi dari program Kepala Daerah dalam rangka mewujudkan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Bontang 2011-2016.

Dalam akhir masa RPJMD Kota Bontang periode 2011 – 2016 ini, tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2016 harus menjadi landasan dan pondasi Visi dan misi Kepala Daerah terpilih. Sedangkan Visi Pemerintah Kota Bontang yang sekarang adalah :

"Terwujudnya Masyarakat Bontang yang Berbudi Luhur, Maju, Adil dan Sejahtera "

Sebagai acuan pembangunan, maka semua unsur pembangunan perlu memahami makna yang terkandung dalam visi tersebut. Adapun makna dari butir-butir visi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- **Berbudi Luhur** dimaksudkan sebagai suatu karakter masyarakat yang berbudi luhur dan memiliki sikap budaya bangsa sesuai dengan nilai-nilai agama dan Pancasila. Nilai-nilai luhur yang perlu ditanamkan kepada seluruh lapisan masyarakat adalah cinta kebenaran, kesabaran, kasih sayang, kedermawanan dan keberanian.
- **Maju** dimaksudkan sebagai suatu kondisi wilayah dan masyarakat yang memiliki daya saing dan unggul baik dalam skala regional maupun nasional dalam berbagai bidang pembangunan.
- **Adil** dimaksudkan sebagai suatu kondisi masyarakat yang memiliki kesamaan hak dalam hukum dan pelayanan kemasyarakatan, pemerintahan dan pembangunan yang dapat mewujudkan pemerataan distribusi dan akses terhadap sumberdaya dan hasil-hasil pembangunan.
- **Sejahtera** dimaksudkan sebagai suatu kondisi wilayah dan masyarakat Kota Bontang yang secara lahiriah dan batiniah mendapatkan rasa aman dan makmur dalam menjalankan kehidupan

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut ditempuh melalui 4 (empat) misi pembangunan daerah, yakni :

- a. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Kota Bontang yang berakhlak mulia dan profesional.
- b. Meningkatkan kualitas tata pemerintahan yang baik.
- c. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup
- d. Memperkuat struktur ekonomi dan mempercepat pemenuhan kebutuhan listrik, air bersih serta infrastruktur lainnya.

Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Kota Bontang yang berakhlak mulia dan profesional merupakan upaya pemerintah dan masyarakat Kota Bontang membangun sumberdaya manusia yang sehat, cerdas, produktif, kompetitif yang didasari keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, guna terwujudnya sumberdaya manusia yang berakhlak mulia dan profesional. Pembangunan Sumberdaya Manusia yang berkualitas dalam arti berakhlak mulia dan profesional merupakan suatu yang mutlak dalam rangka meningkatkan daya saing daerah yang menuntut sumberdaya manusia untuk lebih berketerampilan, berdaya saing tinggi, menguasai bahasa/komunikasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi.

Meningkatkan kualitas tata pemerintahan yang baik merupakan upaya pemerintah dan masyarakat Kota Bontang membangun tatanan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa yang merupakan prasyarat untuk mewujudkan dan meningkatkan daya saing Kota Bontang di segala bidang secara berkelanjutan, yang dapat menjamin pengelolaan sumber daya pembangunan secara akuntabel, meningkatnya kualitas pelayanan publik, meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Sehingga keadilan dan kepentingan masyarakat luas selalu diutamakan, meningkatkan martabat dan integritas bangsa, dan pada akhirnya makin meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Meningkatkan kualitas lingkungan hidup merupakan upaya pemerintah dan masyarakat Kota Bontang untuk meningkatkan kualitas dan kelestarian lingkungan hidup sebagai upaya untuk mengelola daya dukung dan memulihkan kualitas daya tampung lingkungan hidup dalam rangka mewujudkan pembangunan di Kota Bontang yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, sehingga seiring dengan meningkatnya kualitas dan kelestarian lingkungan hidup Kota Bontang keberlanjutan pembangunan di daerah ini dapat lebih terjamin.

Memperkuat struktur ekonomi dan mempercepat pemenuhan kebutuhan listrik, air bersih serta infrastruktur lainnya merupakan upaya pemerintah dan masyarakat Kota Bontang meningkatkan kemampuan perekonomian daerah dengan struktur perekonomian yang kokoh, dan mempercepat upaya pemenuhan kebutuhan listrik dan air bersih, pembangunan infrastruktur wilayah secara efektif dan efisien dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat kota dan mendorong investasi serta tumbuh kembangnya ekonomi berbasis kerakyatan dan sektor ekonomi basis yang mempunyai daya saing baik di tingkat regional, nasional dan internasional.

Dalam rangka mewujudkan visi-misi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bontang maka tujuan, sasaran dan kebijakan yang harus disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya yang ada dalam visi-misi Kota Bontang terutama pada Misi pertama yaitu **“Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Berakhlak Mulia dan Profesional”**. Serta Tujuan 6 dan 7 RPJMD Kota Bontang 2011-2016.

Selanjutnya tujuan dan sasaran Dinas Pemuda dan Olahraga itu sendiri harus merupakan penjabaran secara spesifik dari tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan Pemerintah Kota Bontang yang tertuang dalam RPJMD 2011-2016 (***Tujuan 6 : Meningkatkan Peran Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia Kota Bontang. Dan tujuan 7 : Meningkatnya Peran Organisasi Keolahragaan Dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia Kota Bontang***).

3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bontang

A. Tujuan Renja

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bontang tahun 2016 disusun dengan maksud untuk menjadikan acuan perencanaan program dan kegiatan tahun 2016, sehingga tersedia perumusan kebijakan teknis lingkup bidang bina kepemudaan dan bina keolahragaan dan terwujudnya pengkoordinasian, pengendalian seluruh kegiatan pada unit kerja dinas dan hubungan koordinasi yang baik dengan pihak-pihak lain.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dengan disusunnya Renja Dinas Pemuda dan Olahraga tahun 2016, sama dengan tujuan disusunnya Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bontang 2011 – 2016 adalah :

1. Meningkatnya peranan Dinas Pemuda dan Olahraga dalam rangka merumuskan kebijakan teknis pada lingkup bidang pembinaan kepemudaan dan pembinaan keolahragaan;
2. Terselenggaranya kegiatan dan program yang sesuai dengan tupoksi dan aspirasi masyarakat.
3. Terciptanya kondisi sinergis dan terbuka antara pihak pemerintah, organisasi kepemudaan, dan organisasi keolahragaan serta seluruh komponen masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.
4. Dukungan penuh semua pihak dalam Gerakan Revitalisasi Pramuka.
5. Meningkatnya kecintaan masyarakat terhadap olahraga, sehingga terwujudnya masyarakat yang sehat dan bugar.
6. Meningkatkan potensi pemuda Kota Bontang, sehingga terwujudnya pemuda yang inovatif dan mandiri.

7. Terlaksananya Regenerasi atlet – atlet berprestasi dan terkaderisasinya pemuda sebagai calon pemimpin potensial dimasa depan.
8. Terpenuhinya sarana dan prasarana olahraga dan kepemudaan di Kota Bontang.

B. Sasaran Renja

Adapun sasaran yang ingin dicapai yaitu :

1. Pemenuhan fasilitas umum dan fasilitas sosial yang berhubungan dengan kegiatan kepemudaan dan olahraga.
2. Partisipasi aktif masyarakat, pemuda dan olahragawan / atlet dalam membangun Kota Bontang melalui peran keorganisasian, kepemudaan dan keolahragaan.
3. Terciptanya kerjasama yang baik serta simbiosis / hubungan mutualisme antara Dinas Pemuda dan Olahraga dengan organisasi kepemudaan maupun organisasi keolahragaan dalam mensukseskan visi dan misi Pemerintah serta SKPD.
4. Lahirnya generasi muda harapan bangsa yang mandiri dan berprestasi dalam segala bidang.

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang maksimal, disusunnya program/kegiatan dalam renja ini, adalah demi pencapaian visi misi kepala daerah dan SKPD. Selain itu faktor penunjang lainnya pencapaian target renstra SKPD dan wujud nyata pengimplementasikan tupoksi SKPD sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pada dasarnya penyusunan program/kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga berpedoman pada Permendagri no. 13 tahun 2006 dan perubahannya no. 59 tahun 2007. Adapun program-program pembangunan yang akan dilaksanakan yaitu :

1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
2. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
3. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
4. Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba
5. Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga
6. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda
7. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda.

Selain berdasarkan hal diatas, program dan kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bontang berdasarkan pada hasil Rakor Dinas Pemuda dan Olahraga



Se-Kalimantan Timur di Kabupaten Penajam Paser Utara, tanggal 11 – 13 Maret 2015. Tujuan penambahan program/kegiatan berdasarkan hasil rakor, agar terciptanya sinkronisasi program/kegiatan antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota,

Dari ketujuh program/kegiatan diatas, maka disusunlah program dan kegiatan yang sesuai dengan dimensi waktu perencanaan yang terlampir pada Renja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bontang tahun 2016.

Tabel yang membuat rumusan rencana program dan kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bontang tahun 2016 dan prakiraan maju tahun 2017 dan Berita Acara Rakor Dinas Pemuda dan Olahraga Se-Kalimantan Timur di Kabupaten Penajam Paser Utara, tanggal 12 – 14 Maret 2015.

BAB IV**PENUTUP**

Demikian Rencana Kerja (Renja) Tahun 2016 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Dinas Pemuda dan Olahraga ini dibuat, untuk dipergunakan sebagai pedoman bersama dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi serta pedoman dalam penyusunan RKA Tahun 2016, yang memuat rancangan kerangka prioritas pembangunan, rencana kerja dan pendanaannya.

Tak lupa saya mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Renja 2016. Baik keterlibatan secara aktif ataupun dalam bentuk sumbang saran pemikiran yang bertujuan untuk menyempurnakan Renja 2016 ini.

Diharapkan dengan adanya Renja 2016 ini, dapat memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh pimpinan, serta acuan kerja bagi seluruh aparatur Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bontang sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja yang lebih baik di masa datang, pengukuran dan pertanggungjawaban kinerja yang akuntabel, transparan dan suksesor pencapaian visi misi Pemerintah Kota Bontang serta visi misi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bontang.

“PEMUDA MAJU, OLAHRAGA JAYA, SALAM PRAMUKA!”

Bontang, Agustus 2015

Kepala Dinas

Drs. Bambang Cipto Mulyono, M.Si

Pembina TK I

19650420 199203 1 007